KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

OFTNNH0E

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

H.1 NOMOR			H.4 X	H.4 X Final		
			н.5	Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP : 68 807	5 7 5 3 7	2 2 0 0 0				
A.2 NIK :						
A.3 Nama : SAPARIAH						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3 21-402-01	472.500	472.500	0	5	23.625	
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan: B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	RUMAH SAKIT JIWA DAEF 1 6 dd 0 3 mm HARI JUMADI	Ahwa bukti Pemotongan/Pemungut]	
	C	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa d	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	